

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Elim, 2016). Aset tetap menurut PSAP No. 7 Paragraf 4 merupakan aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Erlina & Sakti Rambe., 2015:245). Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasi untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap yang ada dalam pemerintah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP No. 7 Paragraf 7-14) yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan (Erlina & Sakti Rambe., 2015:246). Dalam PSAP No. 7 paragraf 15-19 jelas dikatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud

untuk digunakan. Aset tetap diperoleh dengan beberapa cara seperti membeli secara tunai, membeli secara kredit atau angsuran, pertukaran, dibangun sendiri, dan donasi.

Aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat digunakan pemerintah untuk kegiatan pengembangan daerah. BPPKAD Kabupaten Sampang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset daerah. Dalam pengelolaan aset daerah dibutuhkan pengendalian internal yang baik. Pentingnya pengelolaan aset yang baik berguna meminimalisasi masalah pengelolaan aset. Masalah pengelolaan aset tetap yang sering terjadi pada pemerintah daerah diantaranya aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BPPKAD berpengaruh pada hak kepemilikan aset tetap tanah. Kepemilikan aset-aset pemerintah tersebut banyak yang belum memiliki sertifikat terkhususnya aset tetap tanah yang dibeli pada masa lampau karena dokumen pelepasan hak milik pada saat pembelian tanah tersebut tidak disimpan dengan baik. Sehingga pada saat pemrosesan sertifikat tanah dokumen yang diminta sebagai persyaratan tidak lengkap, seperti yang terjadi pada BPPKAD Kabupaten Sampang. Selain itu disebabkan oleh kurangnya SDM. Oleh karena itu perlu adanya sistem pengendalian yang tepat sehingga bertujuan untuk menjaga keamanan aset milik pemerintah.

Hal ini, akan dilakukan penelitian evaluasi sistem pengendalian internal aset tetap tanah yang ada pada BPPKAD Kabupaten Sampang, untuk mengetahui sistem pengendalian internal pengelolaan aset tetap tanah sudah sesuai prosedur yang diterapkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan tugas akhir ini peneliti mengambil judul : “SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ASET TETAP TANAH PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN SAMPANG”.

1.2. **Penjelasan Judul**

Agar penelitian tugas akhir ini dapat mudah dipahami oleh orang lain, maka peneliti akan menguraikan secara singkat mengenai judul tugas akhir ini yaitu :

Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian atau penafsiran secara teknis dan ekonomis terhadap suatu objek(Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Sistem

Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem untuk mencapai tujuan yang sama(Fauzi, 2017:2).

Pengendalian Internal

Pengendalian internal atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu (Dewi, 2016:61).

Aset Tetap

Aset tetap menurut PSAP No. 7 Paragraf 4 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Erlina & Sakti Rambe., 2015:245).

Tanah

Tanah adalah permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu Negara atau menjadi daerah Negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang

Instansi pemerintah dimana dijadikan tempat untuk melakukan penelitian dan untuk penulisan tugas akhir.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : Bagaimana sistem pengendalian internal aset tetap tanah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang ?

1.4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah mengetahui sistem pengendalian internal aset tetap tanah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang.

1.5. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah :

- a) Bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pengelolaan aset tetap tanah karena masih banyak aset tetap tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.

- b) Bagi STIE Perbanas Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal pengelolaan aset tetap tanah.

- c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan masukan-masukan untuk penelitian selanjutnya sehingga lebih dapat memahami tentang sistem pengendalian internal pengelolaan aset tetap tanah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu :

1) Data Primer

Data primer yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu melakukan wawancara langsung dengan bagian pengelolaan aset pemerintah.

Data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini dengan kisi-kisi pertanyaan sebagai berikut :

- a. Pengamanan aset tanah pemerintah
- b. Syarat mendapatkan sertifikat tanah
- c. Penyebab tanah pemerintah belum bersertifikat
- d. Pemisahan tanggungjawab
- e. Lingkungan pengendalian
- f. Penilaian resiko
- g. Kegiatan pengendalian
- h. Informasi dan komunikasi terhadap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
- i. Pemantauan

2) Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari tempat penelitian berupa data yang berkaitan dengan permasalahan. Data ini berupa dokumentasi.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Pengelolaan aset BPPKAD Kabupaten Sampang atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan meminta dokumen yang diperlukan kepada BPPKAD, data yang diperlukan seperti daftar rekap tanah dan daftar dokumen pengajuan sertifikat tanah.

1.6.3. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan aset tetap tanah, data yang di dapat yaitu persyaratan untuk peralihan nama dalam sertifikat tanah dan rekap tanah milik pemerintah.
2. Melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan aset pada BPPKAD Kabupaten Sampang mengenai unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
3. Merangkum jawaban wawancara dari narasumber dengan membuat daftar pertanyaan dan jawaban.

4. Menyimpulkan hasil wawancara yang telah dirangkum dan mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atas pengelolaan aset tetap tanah yang ada pada BPPKAD Kabupaten Sampang.

